

**IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KOTA SURAKARTA**

Intan Kartikasari, Sri Witurachmi*

***Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Email korespondensi: sriwiturachmi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah, (2) Penyusunan anggaran keuangan sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007(3) Kepatuhan penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RKAS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* dengan Strategi tunggal terpancang studi kasus di SMK Negeri 5 Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah informasi, dokumen dan arsip, serta tempat dan peristiwa. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data digunakan tehnik wawancara, observasi, dokumentasi. Uji *Validitas* data digunakan *Validitas* sumber. Analisis data digunakan analisis *interaktif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan meliputi tiga tahap yaitu: (1) Tahap Perencanaan meliputi pengelolaan keuangan sekolah di sesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran keuangan sekolah yang sudah dipola yang bernama RKAS merupakan kumpulan program dalam satu wadah yang dahulu di namakani RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. (2) Tahap Pelaksanaan meliputi pelaksanaan RKAS yaitu pertanggung jawaban, system, dan prosedur keuangan sekolah, sasaran dan hasil kegiatan dan anggaran sekolah, dasar hukum, dan alat bantu yang mencatat transaksi keuangan sekolah dan Standar Akuntansi Pemerintah. RKAS berkaitan dengan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jika terdapat kegiatan yang mendadak dan program yang harus di utamakan dalam kegiatan pada jangka waktu dekat maka akan menggunakan rencana kegiatan dan angaran sekolah perubahan (RKASP). Jika ada rencana kegiatan susulan maka pelaporan keuangan sekolah akan menerbitkan kembali RKASP yang hasilnya bisa dievaluasi dan disesuaikan dengan program yang baru. Keberadaan program SIMDA saat ini mengharuskan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah baik sistem dan prosedur yang digunakan menggunakan sistem *onlin* (3) Tahap **Supervisi dan Evaluasi** ini dilakukan oleh pihak internal (kepala sekolah, penanggung jawab pelaksana) serta pada pihak eksternal (direktorat dan pengawas). Untuk tahap pertanggung jawaban sumber dana di lakukan oleh pihak pembuat program pihak input dan pihak output (sumber dana dari pemerintah seperti BOP, Bantuan Proyek, dan Batuan sumber dana lain-lain). **Hambatan** yang dihadapi adalah adanya keterlambatan sumber dana (BOPS) yang harus dibayar oleh siswa mengakibatkan keterlambatan dalam pengadaan kekurangan fasilitas ruangan kelas dan fasilitas lain .Upaya-upaya yang dilakukan (a.) Menggerakkan wali kelas untuk menghimbau siswanya segera membayar BOPS(b.) Memberikan surat peringatan kepada kepada orang tua siswa agar secepatnya membayar berdasarkan kesepakatan. ©. Menghimbau kepada siswa agar secepatnya membayar Biaya Oprasional Pendidikan Sekolah selambat-lambatnya pada bulan Desember s/d bulan berikutnya. (d) Memberikan sosialisasi, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) rutin, dan peningkatan manajemen mutu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dalam meningkatkan program sekolah.

ABSTRACT

*This research is aimed to find out: (1) The system and procedure of financial management at school, (2) The arrangement of financial estimation at school based on Permendiknas Number 19, 2007 (3) The obedience of arrangement and The Realization of School Financial Management (RKAS) towards Permendiknas Number 19, 2007. This research used qualitative descriptive research method with singular strategy of study-case at SMK Negeri 5 Surakarta. The data resource which is used is information, document and archive, including location and event. The sample determination is done by using purposive sampling. The data collecting is done by using interview, observation, and documentation. The data validity experimental is done by using resource Validity. The data analysis is done by interactive analysis. The result of the research shows that the system and procedure of financial management has three phases: (1) **Planning Phase** contains school financial management which is adjusted by the planning of activity and the designed school financial management which is named as RAPBS before changing into RKAS or RAKS (2) **Implementing Phase** along with the implementation of RKAS such as responsibility, system, and procedure at school financial, target and achievement of school activity and estimation, base of law, and assist tool which records the transaction of school financial and the Government Standard Accountancy. RKAS relates to the improvement of access and distribution of education along with the implementation of learning activity programs. If there is a sudden activity and program which should be prioritized in short-term activity, it will use planning of activity and the changing of school estimation (RKASP). If there is an addition of activity planning, the report of school financial will re-publish RKASP which the result can be evaluated and adjusted by new program. The existence of SIMDA program arranges that all activity relates to systematic and procedural school financial activity to use online system (3) **Supervision and Evaluation Phase** which is done by internal party (headmaster, responsibility executor) and external party (directorate and supervisor). Fund resource responsibility phase is done by programmer party, input and output party (fund resources from the government such as BOP, Project Assistance, and other fund resource assistances). The obstruction which occurs is the delay of fund resource (BOPS) which should be paid by the students will cause the delay of supplying the lack of classroom facilities and others. The undertaken efforts which are done (a) Instruct the guardian class teacher to tell the students to pay BOPS (b) Sent the warning letter to student parents to pay based on the agreement. (c) Inform to the students to immediately pay for BOPS as late as possible in December until next month. (d) Give socialization, routine workforce training, and improving the management of quality standard in or outside school environment to improve school programs.*

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, manajemen keuangan, dan pelaksanaan anggaran

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah membawa jiwa dan semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek dalam desentralisasi daerah. Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani beberapa sektor, seperti pemerintahan, kesehatan,

pendidikan, pariwisata, industri, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, warna dan corak pendidikan di daerah tergantung pada komitmen dan kepedulian bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota. (Indra Bastian, 2007: 52). Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah ini dibelanjakan. (Indra Bastian, 2007: 52). Pada Bidang pendidikan umumnya sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggung jawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggung jawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus deficit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Indra Bastian, 2007: 52). Untuk memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan maka harus memiliki sistem perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, dan sistem informasi manajemen dan penilaian khusus di sekolah. Sekolah harus mempunyai visi misi tujuan dan strategi yang jelas yang dituangkan dalam program kerja

Penelitian ini dilakukan di SMKN 5 Surakarta. Tujuan program SMK secara umum, yaitu menyiapkan tenaga lulusan yang siap kerja, cerdas, terampil, dan kompetitif serta kebijakan pembenahan atau revitalisasi peralatan SMK., Visi misinya adalah mewujudkan SMK yang bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, maupun mengembangkan keunggulan local, dan bersaing di pasar global. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007). Struktur organisasi sekolah disamping Kepala sekolah terdapat bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang budaya dan lingkungan sekolah, dan peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Bidang Keuangan dan Pembiayaan sekolah serta menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah mengatur, sebagai berikut: (1). Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola. (2). Penyusunan dana pencairan anggaran, serta

penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. (3). Kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah selama membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. (4). Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya. Sehingga pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Program-program pendidikan nasional perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut: 1) Strategi Pendanaan Pendidikan, 2) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan Internal, 3) Sistem Pemantauan dan Evaluasi dan 4) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu. Dalam hal ini peneliti akan mengulas lebih jauh tentang implementasi program pendidikan nasional tentang strategi pendanaan pendidikan. Peraturan menteri pendidikan nasional tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keuangan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* atau negara maju lainnya. *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintah negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. (Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang SBI pada Pasal 1).

Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS/ dan RKAS. Batuan pada SBI dihitung dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah. Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja

yang sesuai dengan tujuan Jurnal Ilmiah .Penyelenggaraan SBI. (Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang SBI pada Pasal 13).

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan. Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wilayah dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggung jawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidik, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional maka perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan mewujudkan sasaran informasi kemendiknas pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi rencana strategi mencakup kegiatan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. (Renstra Kemendiknas (2010-2014)).

Untuk tetap bisa menyajikan informasi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan dan laporan keuangan sekolah, maka dari itu rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sangat berhubungan langsung dengan penyajian informasi dan administrasi sekolah. Sehingga pada waktu rencana kegiatan dan anggaran sekolah dilakukan, maka sekolah akan melakukan kegiatan realisasi anggaran keuangan sekolah untuk sejauh mana nilai perubahan dengan anggaran keuangan sekolah melihat dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan Penelitian terdahulu yaitu Persepsi *Stakeholders* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal (Sutejo 2009) dan Penelitian Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) di kota Padang (Studi Kasus pada 4 SMAN dan 4 SMKN) Ulfi Maryati 2011) .

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMK Negeri 5 Surakarta .(2). Bagaimana penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta.(3). Sejauh mana Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta

Kajian pustaka

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Menurut W. Gerald Cote dalam Zaki Baridwan, (1993: 3) “Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”. Sedangkan Sistem menurut Steven A. Moscovice dalam Zaki Baridwan, (1993: 4) adalah *suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu*. Menurut W. Gerald Cote dalam Zaki Baridwan (1993: 3) “Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”. Dalam penelitian ini dimaksudkan adalah system dan prosedur dalam Pengelolaan Keuangan .

Kajian Tentang Akuntansi Sektor Pendidikan

Akuntansi Sektor Pendidikan merupakan sebagian dari proses akuntansi, khususnya proses pencatatan, dan elemen procedural dari akuntansi, seperti aritmetika adalah elemen procedural dari matematika. (Indra Bastian, 2007: 53).**Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Dunia Pendidikan** ; memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan kebijakan.. Salah satu informasi yang penting dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari adalah informasi keuangan. **Siklus Akuntansi Pendidikan:** Pengelompokan tahapan siklus akuntansi laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan

pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil suatu keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, prinsip-prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik Jurnal Ilmiah Intan Kartika Sari .dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi, dinamakan siklus akuntansi. **Tahapan Siklus Akuntansi Pendidikan** :silkus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu:Tahap Pencatatan) Tahap Pengikhtisaran Tahap Pelaporan

Kajian Pelaporan Keuangan

Pengertian Pelaporan Keuangan Suwardjono (2011: 101) mengemukakan bahwa “ Pelaporan ke-uangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagai-mana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara”. **Tujuan Pelaporan Keuangan** .Menurut Suwardjono (2011: 145), “Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan dan pertimbangan dicurahkan. Untuk itu tujuan pela-poran sangat penting karena untuk menentukan bentuk, isi, jenis dan susunan dari laporan keuangan. **Pengelolaan Keuangan Sekolah** Pengelolaan dana harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut dibelanjakan. ekarang ini sekolah dengan program SBI dan sekolah model/rujukan untuk semua program keahlian memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan untuk daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang tercantum di RAKS oleh tiap siswa dan kegiatan sekolah.

Kajian Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh standar-standar pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian (Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005). Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian di SMK Negeri 5 Surakarta. Pendekatan dan jenis penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. H.B. Sutopo (2002, 111) menyatakan bahwa “... penelitian kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Data dan Sumber Data .Sumber data dari informan kunci yaitu kepala sekolah/wakasek bidang sarana dan keuangan serta yang terkait dalam keuangan sekolah. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip Moleong (2000: 112) mengatakan “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Teknik sampling adalah suatu teknik atau cara dalam mengambil sampel yang representative dari populasi. Persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah „bagaimana dapat dipastikan atau diyajinkan bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif“. Burhan Bugin (2003 : 43) teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Digunakan teknik dokumentasi, dimana peneliti mendapatkan data berupa rekaman-rekaman yang merupakan bukti dokumentasi pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah dan wawancara di SMK Negeri 5 Surakarta. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode, data yang diperoleh dari seorang informan diuji dengan berbagai macam metode sehingga dapat diketahui kevalidan dari data tersebut. Kemudian keseluruhan hasil data tersebut dibandingkan pula dengan analisis dokumen. Dengan demikian mutu dari keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menjadi valid.

Teknik analisis data merupakan teknik dalam memeriksa dan menganalisis data sehingga menghasilkan data yang absah dan benar-benar dapat dipercaya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan dan apabila jawaban dari informan tersebut setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Prosedur penelitian adalah tahap-tahap dalam penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian. Dalam penelitian ini prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan laporan adalah tahap pra lapangan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan.

PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian

SMK Negeri 5 Surakarta memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS) 321006101002, saaus sekolah Negeri, Nomor 8865/Ditpt/E, Tanggal 01 Agustus 1965. Sebagai penyelenggara adalah Pemerintah Kota Surakarta dengan waktu Penyelenggaraan pagi dan nomor SK Terakhir Status Sekolah 036/0/1997, lembaga kena pajak adalah SMK Negeri 5 Surakarta untuk nomor pokok wajib pajak 00.004.204.4.526. Fasilitas pendidikan yang dimiliki: a. Bengkel Teknik Konstruksi Kayu. b. Bengkel Teknik Konstruksi Batu dan Beton. c. Bengkel eknik Gambar Bangunan. d. Bengkel Teknik Elektronika Industri. e. Bengkel Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik. f. Bengkel Teknik Pemesinan dan CNC. g. Bengkel Teknik Mekanik Otomotif.Lab. h. Bahasa Inggris. i. Lab. Komputer. Perpustakaan, dan lain-lain. Kerjasama Sekolah bekerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri di Kota Surakarta dan sekitarnya maupun diluar kota propinsi lain dan menjalin hubungan kerjasama menjadi Institusi Pasangan untuk melaksanakan diklat yang meliputi : input proses maupun output pendidikan dan pelatihan.

Deskripsi Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dengan kajian teori implementasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan keadaan sekolah. implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang dipilih oleh SMK Negeri 5 Surakarta ada 3 yaitu: (1.) Mengidentifikasi data yang relevan dengan keputusan yang akan diambil Pengelolaan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

keuangan sekolah di sesuaikan dengan *Rencana Kegiatan dan Anggaran Keuangan (RKAS)*. RKAS itu sendiri merupakan kumpulan program-program yang ada disekolah contohnya WK 1 Kurikulum, WK 2 Kesiswaan, WK 3 Sumber Daya Manusia, WK 4 Pabrik Relesan dan mereka semua memiliki program yang kitra kumpulkan dalam satu wadah dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Sedangkan untuk kepala sekolah, disamping untuk kepentingan sendiri, informasi juga diperlukan oleh pihak lain yang berkepentingan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban.

Dengan demikian implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang dipilih oleh SMK Negeri 5 Surakarta ada 3 yaitu: (1). Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil Pengelolaan keuangan sekolah di sesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Keuangan (RKAS). RKAS itu sendiri merupakan kumpulan program-program yang ada disekolah contohnya WK 1 Kurikulum, WK 2 Kesiswaan, WK 3 Sumber Daya Manusia, WK 4 Pabrik Relesan dan mereka semua memiliki program yang kitra kumpulkan dalam satu wadah yang dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Untuk melihat sampe sejauh manakah nilai perubahan dengan anggaran keuangan sekolah dilihat dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga sumber dana bisa dialokasikan sesuai dengan nominal uang dan disesuaikan dengan kebutuhan bagian-bagian program yang memiliki program tersebut. (2.) Memproses atau menganalisis data yang relevan Dengan adanya RKAS kita bisa memberikan inforamsi dokumentasi yang sesuai denganPerpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011, dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada bagaian B tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Nomor 8 tentang Bidang Keuangan dan Pembiayaan. Untuk itu data keuangan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Jika RKAS sudah sesuai dengan program tersebut maka sasaran, hasil dan karakteristik pasti juga ikut berhasil dan kedua-duanya seimbang. Untuk mengetahui input dana dari masyarakat BOSP (Bantua Oprasional Satuan Pendidikan) dan SPS serta dari pemewrintah kota biasa kita kembangkan dengan kompetensi pengembangan komptensi siswa. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

pengambilan keputusan. Sementara RKAS awal dibuat berdasarakan masing-masing bagian-bagian yang di susun dan menjadi pedoman pengeluaran keuangan sekolah. Kaitanya dengan bertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah. maka pengeluaran fisik sebesar 25%, ATK 5 %, dan bahan praktek 25%. Itu semua yang menjadi pengeluaran keuangan sekolah yang berdasarakan rencana keuangan sekolah. Unruk itu proses sistem dan prosedur pengelolaan tersebut pasti sesuai dengan tujuan kegiatan yang di rancang sesuai dengan anggaran keuangan sekolah tersebut. Jurnal Ilmiah .

PEMBAHASAN

Pada dasarnya laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah pastinya bisa kita lakukan dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan program anggaran dan sumber dana yang diperoleh. Sementara RKAS awal dibuat berdasarakan masing-masing lini maka yang memiliki program dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan satuan mutu. Dengan masing-masing bagian dan disusun sesuai pedoman pengeluaran keuangan sekolah. Tahap Perencanaan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 surakartapengelolaan keuangan sekolah sudah di sesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran keuangan sekolah yang sudah dipola yang bernama RKAS. RKAS merupakan kumpulan program-program yang ada disekolah contohnya WK 1 Kurikulum, WK 2 Kesiswaan, WK 3 Sumber Daya Manusia, WK 4 Pabrik Relesan. Dalam hal ini mereka semua memiliki program dan program tersebut yang kita kumpulkan dalam satu wadah yang dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Untuk mengetahui RKAS atau RAKS maka antar input dengan output saling memiliki keterkaitan yang berhubungan denagan uang masuk yang nominal jumlahnya bisa dibandingkan dengan berapa jumlah program-program yang dihasilkan dari masing-masing lini. Sehingga kesimpulan tersebut biasa kita temukan hasilnya dengan sumber dana yang berdasarakan berapa uang masuk dan berapa program-program yang akan dilaksanakan. Tahap Pelaksanaan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah .Pada dasarnya RKAS di dalam perhitungannya tyang berkaitan dengan program peningkatan akses dan pemerataan

pendidikan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. yang sewaktu-waktu mendadak dan program yang harus di utamakan maka digunakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah perubahan (RKASP). RKAS dengan kegiatanyang disusun sedemikian rupa dan sekarang menjadi RKASP cara penyelesaiannya dengan merencanakan program yang hasilnya dapat dievaluasi.

Setiap satuan pendidiak wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Sumber keuangan pemerintah yang dari pemerintah tingkat II pemerintah kota (PEMKOT) Surakarta, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, dan bantuan masyarakat/ orang tua siswa. Dalam melakukan pembagian tanggung jawab untuk kegiatan terutama pendanaan baik pemerintah kota maupu daerah dilalukan dengan cara sebelum melakukan program kegiatan terlebih dahulu membuat RKAS yang dulu namanya RAPBS.

Pada sasaran pasti disertakan pula dengan rencana, sehingga rencana disusun terlebih dulu dengan estimasi pemasukan sedangkan penerapannya sesuai dengan pemakaian dan rencanarencana. Sehingga kegiatannya pasti pas dan sesuai dengan kegiatan yang di rencanakan. Dengan adanya RKAS bisa mengetahui berapa besar persen anggaran yang akan dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan mendukung akan adanya sekolah yang berstandar mutu serta sekolah yang memiliki predikat SBI. Dasar Hukum yang terkait dengan sistem dan prosedur sofwnya dari pemkot sudah sesuai/ mengacu pada prosedur keuangan daerah yang disingkat SIMDA. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan Kas Daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik, maka dari itu SMK N 5 Surakarta secara otomatis sudah menggunakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Alat Bantu Mencatat Transaksi Keuangan Sekolah dan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam mencatat transaksi keuangan sekolah yang pertama adalah buku rekening dan yang kedua SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah) semuanya menggunakan sistem online. Untuk mengetahui sistem dan prosedur keuangan kita menerapkan prosedur tersebut sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota sudah menggunakan sofwer yang bernama SIMDA. Jadi pada

waktu sistem dan prosedur dilakukan dan untuk bagian prosedur harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan serta proses cata- mencatat.

Bagan alur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Berhubungan dengan struktur organisasi tata usaha, maka yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara I (rutin) berkewajiban mengelola keuangan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan Bendahara II (komite sekolah) berkewajiban mengelola keuangan yang Jurnal .berhubungan sengan anggaran Komite sekolah. Dalam melakukan sistem dan prosedur yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah maka masing-masing bendahara memiliki tugas sesuai dengan kewajiban. Agar sistem dan prosedur bisa dilakukan dengan baik maka SIMDA harus digunakan sesuai dengan prosedur. Untuk itu APBD tingkat II harus dilakukan sesuai dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. pada tahapan proses penatausahaan keuangan daerah, SIMDA ber-peran penting sebagai sarana untuk mempercepat proses siklus keuangan. Dalam SKPD/Unit terkait tidak perlu lagi membuat dokumentasi seperti (SPP, SPM dan SP2D) secara manual, sehingga lebih cepat, akurat dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, SIMDA juga sekaligus sebagai alat pengendalian internal dalam proses penatausahaan, karena di dalam melakukan kegiatan pencairan dana dapat dilakukan dengan cara melalui sumber dana anggaran keuangan SKPD/Unit yang harus melaksanakan segala kegiatan yang sesuatunya disesuaikan oleh prosedur. Dalam hal ini sangat berpengaruh penting, karena telah terbukti sangat membantu ketika pemerintah daerah sedang berada dalam suatu proses audit yang diselenggarakan oleh Bawasda, BPKP ataupun BPK. epada pihak sekolah yang mendapatkan saluran anggaran tersebut. Untuk itu sistem administrasi keuangan daerah dipergunakan, supaya sistem dan prosedur anggaran yang diberikan sesuai dengan realisasi anggaran keuangan sekolah apa tidak. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governace* dan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang undang.

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta dengan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Jika dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai

dengan tata kelola pelaporan keuangan, maka uang persediaan akan bisa diterima oleh pihak sekolah dan pihak sekolah membelanjakan uang tersesub sesuai dengan sistem dan prosedur dari pemerintah daerah yang memberikan dana.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2012 dari SMK N 5 kota Surakarta oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah disetujui dan disahkan menjadi DPA-SKPD yang disahkan atas nama walikota Surakarta sekretaris daerah yang ditanda tangani oleh pembina utama. Uang Persediaan (UP) Dalam Uang Persediaan (UP) kita mendapatkan uang dan kita belanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah diterima maupun Diterima Dengan Revisi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka UP bisa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran anggaran Pelaporan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dengan adanya kegiatan dari UP maka semua pelaksanaan kegiatan dari DPA harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga semua kegiatan bisa dikerjakan oleh semua penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta yang diperoleh dari pendapatan belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) dan kesemua kegiatan anggaran tersebut akan tim anggaran pemerintah kota Surakarta telah melakukan verifikasi atas Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) .Bahwa bagan alur pengelolaan keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta, berdasarkan sistemnya dimana dana APBD II di berikan kepada pihak sekolah untuk di buat Rancangan Keuangan Anggaran yang nantinya akan diproses ulang oleh bagian dokumen pelaksanaan anggaran daerah untuk diberikan kepada pemerintah pusat dan melalui proses dilakukanya persetujuan atau tidak disetujui dimana anggaran tersebut sudah dibuat oleh SMK Negeri 5 Surakarta. Surat Perintah Pencairan (SPP) .Surat Perintah Pencairan (SPP) dana dipergunakan untuk mengajukan SPP sebesar nilai Surat pertanggung jaeabannya kepada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah). Untuk itu yang bertanggung jawab di dalam surat perintah pencairan dana adalah kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum daerah. Surat Perintah

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

Membayar (SPM) .Setelah kita melakukan memproses surat perintah pencairan yang berdasarkan Surat pertanggung jawaban tadi, maka proses selanjutnya kita akan melakukan proses kegiatan yang dinamakan menjadi Surat Perintah Membayar (SPM). SPM dipergunakan untuk membuat surat untuk mencairkan ganti uang persediaan dan proses selanjutnya kita melakukan prosedur yang diberikan kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran. Dalam Surat perintah .membayar jika sah apabila telah ditandatangani dan disetempel oleh Kepala SKPD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rancangan DPPA (DPPKA) SKPD dari SMK Negeri 5 Surakarta tahun anggaran 2012 untuk mendapatkan permohonan pengesahaan mengetahui Kepala SMK Negeri 5 Surakarta selaku kuasa Pengguna Anggaran yang diberikan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan perihal tersebut. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .Berhubungan dengan DPPKA maka dikeluarkanya/ diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikelaurkan untuk melaksanakan kegiatan dalam hubungannya dengan rencana kegiatan anggaran. Jadi dalam hal ini Pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dengan pelaporannya demikian maka output dari aplikasi ini sebagai berikut : (a) Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD beserta perubahanya, dan Surat Penyediaan Dana (SPD). (b). Penatausahaan : Surat Permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian lainnya. c. Akuntansi dan Pelaporan : Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta.

Berhubungan dengan struktur organisasi tata usaha, maka yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara I (rutin) berkewajiban mengelola keuangan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan Bendahara II (komite sekolah) berkewajiban mengelola keuangan yang berhubungan sengan anggaran Komite sekolah. Dalam melakukan sistem dan prosedur yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah

maka masing-masing bendahara memiliki tugas sesuai dengan kewajiban. Agar sistem dan prosedur bisa dilakukan dengan baik maka SIMDA harus digunakan sesuai dengan prosedur. Untuk itu APBD tingkat II harus dilakukan sesuai dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada tahapan proses penatausahaan keuangan daerah, SIMDA ber-peran penting sebagai sarana untuk mempercepat proses siklus keuangan. Dalam SKPD/Unit terkait tidak perlu lagi membuat dokumentasi seperti (SPP, SPM dan SP2D) secara manual, sehingga lebih cepat, akurat dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, SIMDA juga sekaligus sebagai alat pengendalian internal dalam proses penatausahaan, karena di dalam melakukan kegiatan pencairan dana dapat dilakukan dengan cara melalui sumber dana anggaran keuangan SKPD/Unit yang harus melaksanakan segala kegiatan yang sesuatunya disesuaikan oleh prosedur. Dalam hal ini sangat berpengaruh penting, karena telah terbukti sangat membantu ketika pemerintah daerah sedang berada dalam suatu proses audit yang diselenggarakan oleh Bawasda, BPKP ataupun BPK.

Dengan demikian alur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di SMK N 5 Surakarta, sumber data bisa kita jelaskan sebagai berikut: 1) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dua (APBD II):Pada dasarnya sistem administrasi keuangan daerah berfungsi untuk melakukan kegiatan catat-mencatat untuk mengelola anggaran keuangan yang diberikan dari pemerintah daerah/ pemerintah provinsi/ pemerintah pusat kepada pihak sekolah yang mendapatkan saluran anggaran tersebut. Untuk itu sistem administrasi keuangan daerah dipergunakan, supaya sistem dan prosedur anggaran yang diberikan sesuai dengan realisasi anggaran keuangan sekolah apa tidak. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governace* dan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang undang. 2) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) :Dipergunakan untuk mengetahui berapa besar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta dengan persetujuan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Jika dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan tata kelola pelaporan keuangan, maka uang persediaan akan bisa diterima oleh pihak sekolah dan pihak sekolah membelanjakan uang tersesub sesuai dengan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

sistem dan prosedur dari pemerintah daerah yang memberikan dana. 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2012 dari SMK N 5 kota Surakarta oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah disetujui dan disahkan menjadi DPA-SKPD yang disahkan atas nama walikota Surakarta sekretaris daerah yang ditanda tangani oleh pembina utama. 4) Uang Persediaan (UP) :Dalam Uang Persediaan (UP) kita mendapatkan uang dan kita belanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah diterima maupun Diterima Dengan Revisi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka UP bisa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran anggaran Pelaporan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dengan adanya kegiatan dari UP maka semua pelaksanaan kegiatan dari DPA harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga semua kegiatan bisa dikerjakan oleh semua penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta yang diperoleh dari pendapatan belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) dan kesemua kegiatan anggaran tersebut akan tim anggaran pemerintah kota Surakarta telah melakukan verifikasi atas Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012. 6) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bahwa bagan alur pengelolaan keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta, berdasarkan sistemnya dimana dana APBD II di berikan kepada pihak sekolah untuk di buat Rancangan Keuangan Anggaran yang nantinya akan diproses ulang oleh bagian dokumen pelaksanaan anggaran daerah untuk diberikan kepada pemerintah pusat dan melalui proses dilakukanya persetujuan atau tidak disetujui dimana anggaran tersebut sudah dibuat oleh SMK Negeri 5 . Surat Perintah Pencairan (SPP) :Surat Perintah Pencairan (SPP) dana dipergunakan untuk mengajukan SPP sebesar nilai Surat pertanggung jawabannya kepada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah). Untuk itu yang bertanggung jawab di dalam surat perintah pencairan dana adalah kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum daerah Surat Perintah Membayar (SPM) Setelah kita melakukan memproses surat perintah pencairan yang berdasarkan Surat pertanggung jawaban tadi, maka proses selanjutnya kita akan melakukan proses kegiatan yang dinamakan menjadi

Surat Perintah Membayar (SPM). SPM dipergunakan untuk membuat surat untuk mencairkan ganti uang persediaan dan proses selanjutnya kita melakukan prosedur yang diberikan kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran. Dalam Surat perintah membayar jika sah apabila telah ditandatangani dan disetempel oleh Kepala SKPD. 9) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rancangan DPPA (DPPKA) SKPD dari SMK Negeri 5 Surakarta tahun anggaran 2012 untuk mendapatkan permohonan pengesahaan mengetahui Kepala SMK Negeri 5 Surakarta selaku kuasa Pengguna Anggaran yang diberikan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan perihal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Berhubungan dengan DPPKA maka dikeluarkanya/ diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D) yang dikelaurkan untuk melaksanakan kegiatan dalam hubungannya dengan rencana kegiatan ggaran. Jadi dalam hal ini Pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dengan pelaporannya demikian maka output dari aplikasi ini sebagai berikut : a. Penganggaran : Rencana Kerja Anggaran (RKA), okumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD beserta perubahanya, dan Surat Penyediaan Dana (SPD). b. Penatausahaan : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulirpengendalian lainnya. c. Akuntansi dan Pelaporan : Dengan demikian bagan alur sisitem dan prosedur pengelolaan keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta, sumber data bisa kita jelaskan sebagai berikut: Dana Komite Sekolah Dana komite sekolah diperoleh dari rapat pleno komite dan Usulan dari masing-masing bagian/ lini. Untuk itu sumber dana komite sekolah dapat diperoleh dari pemerintah dan masyarakat/ orang tua siswa-siswi. Dengan adanya dana dari orang tua siswa yang berupa Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS) yang bisa kita kelola sesuaikan dengan uang masuk dan kita sesuaikan dengan anggaran yang sudah dipola oleh berbagai macam program-program/ bagian/ lini yang dimiliki oleh Bagian Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang SDM, Bidang Hubungan Industri, Bidang Manajemen Mutu

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

serta berhubungan langsung dengan RKAS. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dipolah sesuai dengan kumpulan-kumpulan program-program yang dimiliki oleh WK 1 (Bidang Kurikulum), WK 2 (Bidang Kesiswaan), WK 3 (Bidang Sumber Daya Manusia), WK 4 (Bidang Hubungan Industri), dan WK 5 (Bidang Manajemen Mutu). Sehingga di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang menyetujui program ini berlangsung adalah kepala sekolah, kepala dinas dikpora kota surakarta, dan ketua komite sekolah. Permohonan Pengesahan RKAS :Permohonan Pengesahan RKAS digunakan untuk mendapatka persetujuan dari pihak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaha Raga Kota Surakarta mengetahui Kepala Sekolah SMK N 5 Surakarta. Pembelian Barang Setelah RKAS dibuat maka renacan selanjutnya adalah pembelian barang yang sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh rencana kegiatan dan angggaran sekolah. Untuk itu pembelian barang juga berdasarkan pada kumpulan program yang memiliki program tersebut. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sekolah didalam sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan. Laporan Kepada Ketua komite Dalam laporan kepada ketua komite kita harus melakukan beberapa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berdasarka sumber data berikut ini :

Permohonan Pembiayaan Dana Komite Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan anggran pada setiap sekolah, sesuai dengan hasil wawancara dengan informasi di lapangan menunjukkan bahwa dalam penggalangan dana dari masyarakat komite sekolah hanya memanfaatkan sumber dana dari iuran komite yang dikutip dari orang tua siswa. Seperti pengajuan permohonan pembiayaan dana komite dengan perincian data sebagai berikut:Setelah kita membuat RKAS maka langkah selanjutnya adalah pembelian barang, maka dari itu proses selanjutnya adalah pembuatan surat pertanggung jawaban yang diberikan kepada dinas pendidikan pemuda dan Olah raga kota surakarta mengetahui kepala sekolah dan persetujuan anggran dan pendapatan belanja sekolah dengan mengetahui kepala dinas dikpora kota surakarta.

Rincian Penerimaan dan Penggunaan Per jenis Anggaran RKAS digunakan untuk mengetahui berapa besar sumber anggaran yang digunakan dan berapa besar uang masuk yang digunakan dalam pembiayaan anggaran pengelolaan keuangan sekolah tersebut. Untuk itu Rincian Penerimaan dan Penggunaan Per Jenis Anggaran RKAS yang harus mengetahui kepala sekolah dan komite Tim Koreksi RKAS digunakan untuk memberikan kevalidtan data yang berhubungan dengan rencana kegiatan dan anggaran

sekolah. Berhubungan hal ini maka tim koreksi RKAS yang berhak menandatangani persetujuan tersebut adalah Pengawas sekolah menengah kejuruan wilayah kota surakarta dan Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Dikpora kota Surakarta serta mengetahui Kepala Dinas Dikpora kota Surakarta. Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Orang Tua Dalam laporan pertanggung jawaban orang tua pihak sekolah melakukan laporan tersebut setiap akhir tahun pelajaran. Sehingga laporan pertanggung jawaban kepada orang tua ini berhubungan langsung dengan rapat pleno komite, untuk itu bisa kita lihat dengan menggunakan sumber

Pengendalian anggaran keuangan kecil yang berasal dari keuangan komite sekolah berhubungan langsung dengan bendahara keuangan sekolah. Untuk itu proses anggaran keuangan kecil sangat memiliki pengaruh di dalam pengendalian keuangan yang berasal dari bendahara dan yang bertanggung jawab penuh adalah bendahara sekolah dan mengetahui komite sekolah.

Pengendalian anggaran keuangan besar yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah semuanya berhubungan langsung dengan sistem dan prosedur beranggungan jawaban yang diberikan oleh masing-masing lini/bagian yang memiliki program terutama pada pengendalian yang diberikan oleh WKS per bagian program dan mengetahui kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah diikut sertakan dalam kaitanya dengan anggaran keuangan sekolah yang besar dan bertugas untuk meneliti kembali realisasi anggaran yang dilaksanakan, apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan RKAS atautkah masih ada RKASP dalam penelitian anggaran yang sudah di alokasikan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah menengah kejuruan negeri pada SMK Negeri 5 Surakarta sudah hampir sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan dasar hukum Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

Pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta :Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta, meliputi tiga tahap yaitu: Tahap Perencanaan :Tahap perencanaan meliputi pengelolaan keuangan sekolah sudah di sesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran keuangan sekolah yang sudah dipola yang bernama RKAS. RKAS merupakan kumpulan program-program yang ada disekolah contohnya pada WK 1 Kurikulum, WK 2 Ke-siswaan, WK 3 Sumber Daya Manusia, WK 4 Pabrik Relesan. Dalam hal ini mereka semua memiliki program dan program tersebut yang kit kumpulkan dalam satu wadah yang dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Sehingga kesimpulan tersebutbiasa kita temukan hasilnya dengan sumber dana yang berdasarkan berapa uang masuk dan berapa program-program yang akan dilaksanakan oleh berbagai lini atau bagian. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan meliputi beberapa aspek yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pertanggung jawaban sistem dan prosedur keuangan sekolah, sasaran dan hasil kegiatan dan anggaran sekolah, dasar hukum, dan alat bantu mencatat transaksi keuangan sekolah dan Standar Akuntansi Pemerintah. RKAS di dalam perhitungannya terutama berkaitan dengan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan adanya kegiatan yang sewaktu-waktu mendadak dan program yang harus di utamakan dalam kegiatan pada jangka waktu dekat maka kita akan menggunakan rencana kegiatan dan anggran sekolah perubahan (RKASP). Bagaimana dengan RKAS yang kegiatan sudah disusun sedemikian rupa. Untuk itu pada saat ada rencana kegiatan susulan maka pelaporan keuangan sekolahan akan menerbitkan kemabli RKASP yang hasilnya bisa kita evaluasi dan kita sesuaikan dengan program yang baru. Sehingga dengan adanya SIMDA maka semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah disini sistem dan prosedur yang digunakan menggunakan sistem onlin dan yang ber-hubungan dengan keuangan sekolah. Tahap Supervisi dan Evaluasi Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program telah di-laksanakan. Tahap ini dilakukan oleh pihak internal (kepala sekolah, penanggung jawab pelaksana) serta pada pihak eksternal (direktorat dan pengawas). Untuk tahap pertanggung jawaban sumber dana di lakukan oleh pihak input (sebuah program yang dibuat dengan digudung oleh

pihak lini ayau bagian pembuat program-program tersebut) dan pihak output (sumber dana dari pemerintah seperti BOP, Bantuan Proyek, dan Batuan sumber dana lain-lain).

Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelola-an Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta antara lain: Sumber dana biaya oprasional pendidikan sekolah (BOPS).Berhubungandengan biaya oprasional pendidikan sekolah, maka pada waktu awal tahun pembayaran kurang tepat waktu dan pembelajaran sistem keuangan sekolah agak sedikit terhambat dengan adanya keterlambatan pem-bayaran keuangan oprasional sekolah. Untuk itu di dalam kita melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah sedikit terhambat dengan adanya keterlambatan pembayaran BOPS siswa terhadap program-program sekolah yang sedikit menghambat di dalam kelancaran pemenuhan fasilitas pendidikan siswa. Kekurangan ruangan kelas dan tempat sepeda yang berhubungan dengan fasilitas pendidikan siswa dalam lingkungan sekolah. Berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan SMK N 5 surakarta dalam menjadi salah satu sekolah yang unggul, maka di dalam kendala ruangan sangat berpengaruh dengan banyaknya siswa yang berjumlah 1800 siswa. Banyaknya input dan output yang dimiliki SMK N 5 surakarta membuat fasilitas sekolah terutama parkir tempat sepeda motor siswa semakin lama semakin berkurang, oleh sebab lahan parkir untuk siswa sangatlah minim. Karena jumlah siswa yang semakin banyak dan kurangnya lahan pada sekolah semakin berkurang maka dari itu sekolah harus meminimalisasi lahan yang sudah ada, karenanya sumber dana sangatlah penting dibutuhkan.. Sehingga program untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kenyamanan belajar siswa sangat diutamakan terutama program pembuatan ruangan kelas dan tempat sepeda yang bisa menampung banyaknya siswa di SMK N 5 surakrta. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta

Upaya-upaya yang dilakukan SMK Negeri 5 Surakarta untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain: . Menggerakkan wali kelas untuk menghimbau siswanya dalam hubungannya dengan Biaya Oprasional Pendidikan Sekolah (BOPS) yang belum dibayarkan kepada bendahara sekolah. Memberikan surat peringatan kepada siswa

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

untuk diberikan kepada orang tua siswa agar secepatnya membayar berdasarkan persetujuan yang sudah disepakati antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Menghimbau kepada siswa agar secepatnya membayar Biaya Operasional Pendidikan Sekolah selambat-lambatnya pada bulan Desember s/d bulan berikutnya. Memberikan sosialisasi, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) rutin, dan peningkatan manajemen mutu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dalam meningkatkan program sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchtar, A. (2009). *Pengukuran Akuntabilitas dan Transaksi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Padang. Tugas Akhir: Program Beasiswa Unggulan, Departemen Pendidikan Nasional, Diploma IV Akuntansi Pemerintahan Politeknik Universitas Andalas Padang.*
- Zaki, B. (1993). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Pendidikan: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.* Editor Abdul Halim. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Jackson, P.M. (1982). *The Political Economy of Bureaucrazy.* Oxford : Philip Allan Publishers Limited.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : Penerbit Andi
- Manda, R. (2009). *Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Payakumbuh. Tugas Akhir: Jurusan Akuntansi Pemerintahan, Politeknik Universitas Andalas Padang.*
- Parwita, D. (2008). *Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas.* Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santosa. (2005). *Partisipasi Pembiayaan dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan (Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bayumas.* Thesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutedjo. (2009). *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal).* Tesis: Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ulfi Maryati, Zahara. (2011). *Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK*

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

N) di kota Padang (Studi Kasus pada 4 SMAN dan 4 SMKN). Jurusan Akuntansi dan Manajemen Padang.

Lexy J. Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

<http://saung-ilmu.blogspot.com/2010/08/akuntansi-sektor-pendidikansebagai.html>